



Putus Meluasnya Penularan Lokal

■ DIY Belum Putuskan

Status Perpanjangan Tanggap Darurat

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat, atau melakukan transisi ke langkah yang lebih efektif dalam penanganan Covid-19. Langkah yang diambil untuk menghentikan semua agenda yang memicu kerumunan, demi memperkecil potensi munculnya kluster baru.

Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana mengungkapkan, keputusan untuk tiga bulan ke depan apakah lanjut dengan penerapan status tanggap darurat atau beralih ke penanganan lain masih belum ditentukan. Pemda DIY sedang melakukan kajian dari masyarakat saat ini. Sementara, investasi untuk menyambut kenormalan baru (*the new normal*) hidup di tengah pandemi Covid-19 butuh biaya besar. "Kalau

Yang jelas, untuk penanganan selanjutnya bagaimana mencegah transmisi (penularan) lokal semakin meluas.

Biwara Yuswantana

● ke halaman 11

Penanganan Lanjutan

- Pemda DIY belum akan memilih opsi PSBB.
- Masa tanggap darurat Covid-19 pun akan berakhir pada 29 Mei 2020.
- Sampai saat ini belum diputuskan apakah akan memperpanjang status masa tanggap darurat.
- Tindakan terdekat adalah meniadakan kegiatan budaya yang memicu kerumunan massal di hari Lebaran.
- Sampai Selasa (19/5) sudah ada 206 kasus positif Covid-19 di DIY.
- Kluster lokal yang muncul di DIY di antaranya Indogrosir, Jemaah Tablig, dan GPB.

GRAFIS/FAIZULRAKHMAN

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

arta,

Kepala

Ttd

Putus Meluasnya Penularan

• Sambungan Hal 1

untuk itu masih kami lakukan pembahasan. Apakah memperpanjang status tanggap darurat atau ke transisi lain. Namun untuk PSBB (pembatasan sosial berskala besar) masih belum mengarah ke sana," katanya, Selasa (19/5).

Biwara melanjutkan, yang terdekat untuk saat ini pihaknya justru mengurangi kegiatan kebudayaan terkait perayaan Idul Fitri 1441 H. Beberapa langkah pertimbangan keputusan penanganan di tahap kedua ini sangat perlu diperhatikan. Misalnya, lanjut dia, adanya status tanggap darurat itu sendiri mempermudah komunikasi antara balai kesehatan dengan Pemda DIY terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) hingga alokasi anggaran.

Ia khawatir, di masa transisi kali ini banyak bermunculan klaster baru positif Covid-19. Pihaknya tetap melakukan evaluasi tiga bulan masa tanggap darurat yang rencananya akan berakhir 29 Mei nanti. "Dari kajian itu kan nanti ketemu penanganan selanjutnya seperti apa. Yang jelas, untuk penanganan selanjutnya bagaimana mencegah transisi (penularan) lokal semakin meluas," tegas dia.

Biwara enggan memberi gambaran, apakah nantinya akan berlakukan sanksi tegas. Misalnya, bagi warga yang tidak patuh protokol kesehatan akan dikenakan sanksi sosial atau bentuk lain. Ia tidak memungkiri jika sebagian langkah sudah dinilai sempurna dalam penanganan Covid-19 selama tiga bulan pertama. Namun, pada implementasinya ter-

nyata masih banyak yang perlu dilakukan evaluasi.

"Misalnya, saat ini masyarakat sudah bukan lagi memprioritaskan makanan. Bukan lagi pasar tradisional yang dituju, tapi di pusat perbelanjaan. Nah, ini kan yang perlu diantisipasi dan tidak terpikirkan sebelumnya. Saya kira kepatuhan masyarakat menjadi kunci," tegas dia.

Bansos

Pemerintah pusat telah memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Merespons hal itu, Pemda DIY juga sedangancang-ancang untuk memikirkan keberlangsungan bantuan tersebut. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi mengatakan, pemberian bantuan khusus warga terdampak Covid-19 memang berbeda pendekatannya.

Meski secara garis besar, pemenuhan bantuan secara merata menjadi muara bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena sejak awal, sifat pemberian bantuan warga terdampak Covid-19 adalah menggenapkan besaran bantuan senilai Rp600 ribu. Baik itu dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) hingga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga sembako reguler dan perluasan.

Menurutnya, Pemda DIY masih butuh status tanggap darurat, karena beban insentif untuk pemenuhan hidup masyarakat sangat tinggi. Apalagi sejak munculnya banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja. Status tanggap darurat tersebut dibutuhkan lantaran menurut Untung, hanya melalui itulah pemerintah pusat akan memberikan jalan insentif untuk penanganan.

Untung pun mengetahui

jika pemerintah pusat akan memperpanjang penyaluran bansos bagi warga terdampak Covid-19. Pemerintah mengalokasikan dana bantuan tunai sebesar Rp32,4 triliun. Sementara bagi penerima PKH, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp37,4 triliun.

Penyaluran itu pun rencananya akan diperpanjang hingga Desember. Untung melanjutkan, jika masa tanggap darurat tidak ada, pemda harus membentuk langkah penanganan lain yang lebih efektif.

"Kalau tidak ada tanggap darurat, ya, mana bisa cairkan bantuan. Saya sudah mendengar perpanjangan penyaluran bansos tersebut. Meski diperpanjang, tapi sangat mungkin jika nominalnya akan dikurangi, informasinya hanya Rp 300 ribu," urainya.

Menanggapi hal lain, mengenai penyaluran bansos tahap pertama ini, jika di total ada 169.383 keluarga. Dari tiga klasifikasi penerima bantuan yakni PKH, Sembako Reguler, dan Sembako Perluasan.

Anggarannya pun mencapai Rp203.259 miliar. Meski sudah berjalan, untungnya menyadari akan ada kesalahan data yang berimbas pada KPM. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya mendesak sinos kabupaten/kota supaya membuat data keluarga yang berhak menerima bansos tapi tidak termasuk ke daftar penerima.

"Karena biasanya itu verifikasi dari kalangan buruh. Mereka jumlahnya banyak. Ada yang salah NIM dan sebagainya. Ya, ini kami desak kepada kabupaten/kota supaya mendata persoalan yang demikian. Untuk saat ini masih belum diketahui berapa jumlah yang tak terverifikasi," pungkasnya. (bda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005